



BAB II

GAMBARAN UMUM EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bahwa dalam proses perencanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kondisi atau kerangka ekonomi daerah yang secara nyata dipengaruhi oleh faktor internal yang merupakan kondisi perekonomian di daerah itu sendiri, maupun faktor eksternal antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Kerangka ekonomi ini menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan terkait pencapaian kinerja pembangunan daerah, yang dalam hal ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017.

Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2017, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

2.1 Gambaran Umum Ekonomi Makro

Perekonomian Kota Magelang pada tahun 2017 masih menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan yang diperkirakan dihadapi adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong potensi lapangan usaha dominan.
- b. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Perbaikan iklim investasi perlu dilakukan pemerintah Kota Magelang dengan perbaikan peraturan perundang-undangan daerah, perbaikan kualitas pelayanan, efektifitas pajak dan penyederhanaan birokrasi.
- c. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.



- d. Meningkatkan daya saing dan produksi ekspor daerah. Pertumbuhan ekspor akan mempengaruhi keberlangsungan usaha dan perekonomian daerah sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.
- e. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.
- f. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.
- g. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.
- h. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
- i. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
- j. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dan penjangkaran riset inovatif sehingga dapat meningkatkan daya saing Kota Magelang dalam menarik atensi investor untuk memperbesar peluang percepatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasar kondisi obyektif tantangan perekonomian Kota Magelang tahun 2017, maka pada tahun 2017 perekonomian Kota Magelang memiliki prospek antara lain:

- a. Dengan menyesuaikan data historis PDRB penyesuaian tahun dasar 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh sekitar $5,35 \pm 0,14\%$ dengan kecenderungan naik.
- b. Inflasi diperkirakan pada kisaran angka $4,04 \pm 1,65\%$ dengan kecenderungan menurun.



- c. Laju pertumbuhan penduduk diprediksi mencapai 0,35%.
- d. PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp7.887.579,1 juta tumbuh 10,07%.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp63.164.302,43 per tahun.
- f. PDRB perkapita atas dasar harga konstan diperkirakan sebesar Rp46.557.773,90 per tahun.

Adapun gambaran umum ekonomi Kota Magelang Tahun 2017 berdasarkan prospek dan prediksi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi

Dinamika perekonomian yang relative terkendali, mendukung kinerja pembangunan yang semakin baik pada tahun 2017, dimana perolehan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang diprediksi sebesar Rp. 7,545 triliun (deviasi 0,69%) atau tumbuh 5,19% dengan trend mendekati pertumbuhan riil potensialnya. Sektor dominan dalam pencapaian nilai tambah bruto adalah Konstruksi, sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Beberapa sektor pembentuk PDRB memiliki potensi dikembangkan untuk mendorong perekonomian makro secara berkelanjutan mengingat daya saingnya yang cukup tinggi di tingkat lokal maupun regional. Berikut kami gambarkan prediksi perekonomian Kota Magelang tahun 2017, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Realisasi dan Prediksi PDRB Lapangan Usaha di Kota Magelang (adhb), 2016-2017

LAPANGAN USAHA	NTB 2016* (Juta Rupiah)	NTB 2017** (Juta Rupiah)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	135.991,13	142.454,49
Industri Pengolahan	1.128.331,29	1.239.730,46
Pengadaan Listrik dan Gas	20.361,13	21.160,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.979,24	9.601,96
Konstruksi	1.163.178,22	1.262.362,53
Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.006.288,45	1.060.825,03
Transportasi dan Pergudangan	471.954,33	504.756,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	422.789,76	442.114,98



Informasi dan Komunikasi	334.082,07	367.432,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	366.184,95	380.534,04
Real Estate	224.952,98	236.820,26
Jasa Perusahaan	24.810,72	27.892,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	842.640,29	873.126,67
Jasa Pendidikan	529.008,56	604.377,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	195.466,24	215.370,07
Jasa lainnya	140.360,73	156.238,91
PDRB	7.015.380,09	7.544.799,70

Sumber: BPS Kota Magelang (2018)

* Angka Sangat Sementara

** Angka prediksi OPD

Dengan proyeksi pertumbuhan penduduk tengah tahun 2017 yang dipublikasikan oleh BPS Kota Magelang sebesar 0,31% dan prediksi pertumbuhan PDRB adhb 7,55% (deviasi $\pm 0,69\%$), maka diprediksi PDRB per kapita tahun 2017 (adhb) mampu mencapai Rp. 58,92 juta per tahun. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat kami gambarkan dalam table berikut:

Tabel 2.2. Realisasi, Target dan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi

Kota Magelang, 2016-2017

Indikator	Realisasi 2016*	Target 2017	Prediksi 2017**
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,17	4,79-5,29	5,19

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2018);

*Angka Sangat Sementara

*Angka Prediksi OPD

Berdasarkan penjelasan dari Badan Pusat Statistik Kota Magelang bahwa angka riil PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Magelang Tahun 2016 baru keluar setelah 2 (dua) Tahun atau Tahun 2018, sehingga pada tabel 2.1 dan 2.2 angka prediksi pada PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi adalah angka prediksi yang di buat oleh Pemerintah Kota Magelang melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



2) Inflasi

Di sepanjang tahun 2017 gejolak harga komoditas pengeluaran di Kota Magelang mampu terkendali dengan inflasi year on year sebesar 3,9%. Laju inflasi yang terjadi pada posisi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (3,71%) dan Nasional (3,61%). Hal tersebut merupakan rentetan dampak dari kenaikan harga beras di akhir tahun yang mengakibatkan kenaikan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 3,96%. Komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi yaitu beras, telur ayam ras, cabe merah, daging ayam ras, papaya, cabe hijau, wortel, tomat sayur, kacang panjang, gula pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil terbesar terjadinya deflasi adalah bawang merah, bayam, anggur, salak, pir, minyak goreng, nangka muda, tauge/kecambah, jeruk, alpukat (BPS, 2018). Meski demikian inflasi di akhir tahun 2017 masih masuk dalam range target yang ditetapkan. Dari uraian diatas dapat kami gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Inflasi Kota Magelang, 2016-2017

Indikator	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017
Inflasi (%)	2,25	3,36 - 4,94	3,90

Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021; BPS Kota Magelang (2018)

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



Selanjutnya Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud, dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan APBD ini berpedoman pada kebijakan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam hal ini adalah RKPD Kota Magelang Tahun 2017.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2017, kebijakan anggaran Kota Magelang tahun 2017 diarahkan untuk:

- a. Melakukan sinkronisasi program kegiatan Pemerintah Kota Magelang dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi Jawa Tengah,
- b. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan urusan pilihan),
- c. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
- d. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah.
- e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan.
- f. Berupaya untuk terus meningkatkan jumlah besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
- g. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain:
 - 1) Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
 - 2) Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 - 3) Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.



- h. Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal guna mendukung program Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut:

- a. Intensifikasi PAD melalui:
- Optimalisasi sistem pajak on line dengan menambahkan peralatan berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
 - Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah akan segera dikeluarkan SKPD kurang bayar kepada wajib pajak.
 - Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
 - Optimalisasai SDM pajak daerah (fiskus) melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
 - Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
 - Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
 - Peningkatan koordinasi dengan SKPD penghasil lain dan BUMD untuk optimalisasi pendapatan daerah.
 - Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
 - Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan.



b. Ekstensifikasi melalui:

- 1) Perubahan tarif pajak daerah dan tariff retribusi daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi perekonomian daerah.
- 2) Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- 3) Penyesuaian NJOP PBB di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap.
- 4) Penggunaan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli.

c. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Magelang, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat terkecil di lingkungan kelurahan dan kecamatan.

d. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi sistem organisasi dan kelembagaan pendapatan daerah.

Adapun perbandingan anggaran pendapatan tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2016 dan 2017
(dalam ribuan rupiah)

No	URAIAN	ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017
1	Pendapatan Asli Daerah	197.465.478,00	218.085.185,00
	a. Pajak Daerah	24.748.872,00	29.821.800,00
	b. Retribusi Daerah	6.001.756,00	5.422.657,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.181.760,00	7.710.904,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.533.090,0	175.129.824,00
2	Dana Perimbangan	556.101.119,00	576.667.228,00
	a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	29.017.550,00	33.063.552,00
	b. Dana Alokasi Umum	415.469.412,00	440.041.244,00
	c. Dana Alokasi Khusus	111.614.157,00	103.562.432,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	69.610.678,00	132.893.466,00
	a. Pendapatan Hibah	0,00	23.985.271,00
	b. Dana Darurat	0,00	0,00
	c. Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	55.424.183,00	51.494.329,00



No	URAIAN	ANGGARAN 2016	ANGGARAN 2017
	d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	47.039.466,00
	e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	14.186.495,00	10.374.400,00
	PENDAPATAN DAERAH	823.177.275,00	927.645.879,00

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Kota Magelang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.
- Memenuhi pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat PP 48 tahun 2008 dan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10%.
- Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perhitungan gaji untuk tiap tahunnya ditambah accres yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai.
- Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu.
- Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diutamakan untuk memenuhi/mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman.
- Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun.
- Melaksanakan kegiatan yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. yaitu program kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Pengembangan



E-Government secara Komprehensif dan Integral, Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.

Perbandingan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dapat dilihat berikut ini:

Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 dan 2017
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Anggaran 2017
5	BELANJA	1.016.825.539,00	1.075.062.418,00
5.1	Belanja Operasi	722.822.494,00	780.341.519,00
5.1.1	Belanja Pegawai	379.829.166,00	398.105.223,00
5.1.2	Belanja Barang	335.582.618,00	366.357.847,00
5.1.3	Belanja Hibah	3.598.396,00	9.997.833,00
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	3.812.314,00	5.880.616,00
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	246.508.674,00	271.948.238,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	56.500,00	20.596.805,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.465.576,00	87.871.572,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung & Bangunan	66.426.162,00	97.900.065,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	60.869.380,00	58.735.567,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.151.834,00	1.532.714,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud	539.222,00	942.241,00
5.2.7	Belanja Modal BOS	0,00	4.369.274,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	47.494.371,00	22.772.661,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	47.494.371,00	22.772.661,00
6.2	Transfer	641.830,00	560.703,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan	641.830,00	560.703,00

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang untuk tahun 2017 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:



- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
- Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang selama tahun 2017 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Untuk perbandingan anggaran pembiayaan TA 2016 dan 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Perbandingan Anggaran Pembiayaan Tahun 2016 dan 2017
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)
7	PEMBIAYAAN		
7.1	PENERIMAAN		
7.1.1	PENERIMAAN		
7.1.2	PEMBIAYAAN	201.377.094,00	165.144.899,00
7.1.3	Penggunaan Sisa Lebih		
7.1.6	Perhitungan Anggaran	0,00	0,00
	Pencairan Dana Cadangan	150.000,00	2.800.000,00
	Penerimaan Kembali		
	Investasi Non Permanen		
	Jumlah	201.377.094,00	165.144.899,00
3.2	PENGELUARAN		
	PEMBIAYAAN		
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	3.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	7.087.000,00	14.167.657,00
	Pemerintah daerah		
	Jumlah Pengeluaran	7.087.000,00	14.167.657,00
	Pembiayaan Netto	194.290.094,00	147.977.242,00



Pemerintah Kota Magelang

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

NO	URAIAN	ANGGARAN 2016 (Rp)	ANGGARAN 2017 (Rp)
3.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	0,00	0,00